



Pengaruh Kebijakan Kepala Daerah, dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon)

Risma Amelia^{1*}, Roni², Mohamad Badrun Zaman³, Dumadi⁴, Anisa Sains Kharisma⁵

¹⁻⁵ Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhamdi Setiabudi Brebes, Indonesia

rismaamelia2113@gmail.com^{1*}, roni.umus18@gmail.com², badrunmohamad93@gmail.com³,
dumadi_ad@yahoo.co.id⁴ anisasains08@gmail.com⁵

Korespondensi penulis: rismaamelia2113@gmail.com

Abstract. This study was conducted to examine the influence of Regional Head Policies and Rural Economic Development on Community Welfare in Pabedilan Subdistrict, Cirebon Regency. The purpose of this research was to determine the partial and simultaneous effects of these two independent variables on community welfare. The analysis was carried out using the SPSS program. The results of the partial correlation analysis revealed a positive and strong influence between regional head policies and community welfare ($r = 0.746$), as well as a positive and very strong influence between rural economic development and community welfare ($r = 0.831$). Simultaneously, an R value of 0.859 was obtained, indicating a strong relationship, with a coefficient of determination (R^2) of 0.738. This indicates that 73.8% of the variation in community welfare can be explained jointly by regional head policies and rural economic development, with a significant and strong effect.

Keywords: Community Welfare, Regional Head Policies, Rural Economic Development

Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh Kebijakan Kepala Daerah dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun simultan antara kedua variabel independen tersebut dengan kesejahteraan masyarakat. Analisis dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Hasil analisis korelasi parsial menunjukkan adanya pengaruh positif dan kuat antara kebijakan kepala daerah dengan kesejahteraan masyarakat ($r=0,746$), serta pengaruh positif dan sangat kuat antara pembangunan ekonomi pedesaan dengan kesejahteraan masyarakat ($r=0,831$). Secara simultan, diperoleh nilai R sebesar 0,859, yang menunjukkan adanya pengaruh yang erat, dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,738. Hal ini mengindikasikan bahwa 73,8% variasi kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan oleh kebijakan kepala daerah dan pembangunan ekonomi pedesaan secara bersama-sama, dengan pengaruh yang signifikan dan kuat.

Kata Kunci: Kesejahteraan Masyarakat, Kebijakan Kepala Daerah, Pembangunan Ekonomi Pedesaan

1. LATAR BELAKANG

Pendahuluan ini menguraikan konteks penelitian mengenai pengaruh antara Kebijakan Kepala Daerah dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan dengan Kesejahteraan Masyarakat, dilatarbelakangi oleh masalah kemiskinan dan kerawanan pangan di Indonesia (Dumadi 2022). Kesejahteraan didefinisikan sebagai terpenuhinya kebutuhan hidup, baik materiil maupun spiritual, sesuai dengan amanat UUD 1945. Otonomi daerah memberikan tantangan bagi pemerintah daerah untuk mandiri dalam pembiayaan pembangunan (Saprianto, Simbolon, 2023).

Pembangunan berbasis pedesaan (Syahza and Suarman 2013) dianggap krusial untuk memperkuat ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan. Prioritas pembangunan pedesaan meliputi pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan

masyarakat, pembangunan prasarana, dan pengembangan kelembagaan, dengan memperhatikan "*anatomi desa*" dan kearifan lokal (Tumiwa 2021). Penelitian ini mengambil studi kasus di Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, yang memiliki potensi untuk dikembangkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan daerah (Rachmad et al. 2023). Identifikasi masalah meliputi belum optimalnya kebijakan kepala daerah dan pembangunan ekonomi pedesaan, serta belum optimalnya kesejahteraan masyarakat desa (Nursetiawan et al. 2024).

Penelitian ini dibatasi pada Kebijakan Kepala Daerah (Kabupaten), Pembangunan Ekonomi Pedesaan, dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pabedilan pada periode Februari-Juli 2025. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh parsial dan simultan antara kebijakan kepala daerah dan pembangunan ekonomi pedesaan dengan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh tersebut. Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis mengenai pengaruh antar variabel dan menjadi bahan pertimbangan praktis bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rachmad et al. 2023).

2. KAJIAN TEORETIS

Kesejahteraan Masyarakat Desa

Kesejahteraan masyarakat desa pada hakikatnya mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, papan, serta kenyamanan hidup secara menyeluruh (BPS, 2023). Program seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi bukti konkret bahwa akses terhadap hunian layak berdampak positif pada kesehatan dan pertumbuhan ekonomi keluarga desa (Suwarno & Andini, 2023). Dengan kata lain, peningkatan kualitas hidup masyarakat desa harus dimaknai secara holistik, mencakup dimensi fisik dan non-fisik (Hartono & Putra, 2025).

Peran Kebijakan Kepala Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan

Pasca-reformasi, kebijakan desentralisasi melalui UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2014 memberikan ruang bagi kepala daerah untuk merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kondisi lokal (RI, 2014). Kewenangan ini menciptakan peluang besar untuk mendesain kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat. Hartono dan Putra (2025) menegaskan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kapasitas institusional daerah, transparansi, serta partisipasi publik dalam penyusunan dan pelaksanaan program (Hartono & Putra, 2025).

Riset oleh Roni dan Dumadi (2022) menunjukkan bahwa kebijakan kepala daerah memiliki korelasi signifikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat ($r = 0,746$) (Roni & Dumadi, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas kepemimpinan lokal sangat memengaruhi peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama melalui inovasi kebijakan, pelayanan publik yang inklusif, dan respons terhadap persoalan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran.

Pembangunan ekonomi pedesaan diarahkan untuk menggerakkan kekuatan lokal, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kewirausahaan, guna menciptakan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera (Rustinsyah, 2023). Arsyad (dalam Sofyan, 2023) menjelaskan bahwa strategi pembangunan pedesaan harus melibatkan sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat secara kolaboratif (Sofyan, 2023). Kemitraan semacam ini terbukti efektif menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperluas akses pasar (Batumenyan, 2023).

Kewirausahaan desa menjadi salah satu fokus strategis karena memungkinkan warga berperan aktif dalam kegiatan ekonomi lokal. Panda (2023) mencatat bahwa pengembangan kewirausahaan desa mendorong peningkatan kualitas hidup, keterampilan, dan kemandirian ekonomi (Panda, 2023). Selain itu, alokasi Dana Desa yang diatur dalam Permendesa No. 7 Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan (Kementerian Desa, 2023). Perkebunan kelapa sawit sebagai sektor unggulan pedesaan juga menunjukkan kontribusi besar terhadap kesejahteraan warga, terutama melalui penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru (BPDPKS, 2023).

Pemanfaatan Dana Desa yang efektif serta penguatan ekonomi lokal melalui sektor produktif seperti pertanian dan UMKM terbukti dapat menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Kemenkeu, 2023). Sinergi ini akan lebih kuat jika dibarengi dengan tata kelola yang akuntabel dan pemberdayaan masyarakat yang partisipatif. Kesejahteraan masyarakat desa tidak hanya ditentukan oleh kebijakan publik yang responsif, tetapi juga oleh strategi pembangunan ekonomi pedesaan yang terarah dan berkelanjutan. Sinergi antara kebijakan kepala daerah dan pembangunan ekonomi desa menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan desain ex-post facto untuk menguji hubungan antara kebijakan kepala daerah dan pembangunan ekonomi pedesaan terhadap kesejahteraan masyarakat desa, khususnya pada perangkat desa di Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon (Darmawan et al., 2023). Desain ini dipilih karena peneliti tidak melakukan manipulasi variabel bebas, melainkan menganalisis pengaruh yang telah terjadi secara alami di lapangan.

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari kebijakan kepala daerah (X_1) dan pembangunan ekonomi pedesaan (X_2), sementara variabel dependen adalah kesejahteraan masyarakat (Y). Kebijakan kepala daerah diukur melalui indikator seperti terkendalinya masalah sosial, terpenuhinya kebutuhan sosial, dan terbukanya peluang sosial. Pembangunan ekonomi pedesaan diukur berdasarkan pendapatan desa per kapita, ketimpangan pendapatan, perubahan struktur ekonomi desa, dan pertumbuhan kesempatan kerja. Adapun kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada perangkat desa, diukur melalui jumlah dan pemerataan pendapatan, kemudahan akses pendidikan, serta pemerataan dan peningkatan kualitas kesehatan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di Kecamatan Pabedilan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, seperti masa kerja minimal dua tahun dan keaktifan dalam pemerintahan desa. Sampel penelitian terdiri dari 54 responden yang berasal dari 5 desa (Lenaini 2021).

Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner tertutup menggunakan skala Likert 1 sampai 5, disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel (Makbul 2021). Kuesioner ini telah diuji kelayakannya melalui uji validitas menggunakan korelasi Pearson Product Moment dan uji reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach, dibantu oleh aplikasi SPSS.

Selanjutnya, data dianalisis melalui beberapa tahap. Pertama, dilakukan uji prasyarat analisis yang meliputi uji normalitas menggunakan uji *Chi-Kuadrat*. Kemudian, untuk menganalisis hubungan antarvariabel digunakan analisis korelasi parsial dan berganda. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji-t untuk melihat pengaruh parsial, dan uji-F untuk melihat pengaruh simultan dari dua variabel independen terhadap kesejahteraan masyarakat. Keputusan statistik ditentukan

berdasarkan nilai signifikansi ($p < 0,05$) serta membandingkan nilai t-hitung dan F-hitung dengan nilai t-tabel dan F-tabel yang relevan (Fadhilah 2015).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Deskriptif Data Penelitian

Tabel 1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Pertanyaan Awal	Pertanyaan Gugur (Tidak Valid)	Pertanyaan Valid	Alpha Cronbach
Kebijakan Kepala Daerah (X_1)	1-10	-	1-10	0.937
Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X_2)	1-10	-	1-10	0.949
Kesejahteraan Masyarakat (Y)	1-10	-	1-10	0.967

Sumber: Hasil olah data

Tabel ini menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada masing-masing variabel—Kebijakan Kepala Daerah (X_1), Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X_2), dan Kesejahteraan Masyarakat (Y)—dinyatakan valid. Tidak ada butir yang gugur. Nilai reliabilitas Cronbach's Alpha dari masing-masing variabel juga sangat tinggi, yaitu 0,937 (X_1), 0,949 (X_2), dan 0,967 (Y), yang berarti bahwa instrumen memiliki konsistensi internal yang sangat baik.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Chi-Square	Df	Asymp. Sig.
Kebijakan Kepala Daerah	13.222	32	0.999
Pembangunan Ekonomi Pedesaan	24.222	32	0.836
Kesejahteraan Masyarakat	30.333	22	0.111

Sumber: Hasil olah data

Hasil uji normalitas menggunakan Chi-Square menunjukkan bahwa semua variabel memiliki distribusi data yang normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (Asymp. Sig.) $>$ dari 0,05 untuk ketiga variabel, masing-masing sebesar 0,999, 0,836, dan 0,111. Dengan demikian, data memenuhi syarat untuk dilakukan analisis statistik parametrik.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Kebijakan Kepala Daerah (X₁) dan Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kebijakan Kepala Daerah	54	11	46	28.06	10.158
Kesejahteraan Masyarakat	54	16	50	37.91	9.485

Sumber: Hasil olah data

Rata-rata nilai variabel kebijakan kepala daerah sebesar 28,06 dengan standar deviasi 10,158. Sedangkan rata-rata nilai kesejahteraan masyarakat sebesar 37,91 dengan standar deviasi 9,485. Nilai ini menunjukkan persebaran data responden yang cukup bervariasi terhadap kedua variabel.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Parsial antara Kebijakan Kepala Daerah (X₁) dan Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Variabel 1	Variabel 2	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)
Kebijakan Kepala Daerah	Kesejahteraan Masyarakat	0.746	0.0
Kesejahteraan Masyarakat	Kebijakan Kepala Daerah	0.746	0.0

Sumber: Hasil olah data

Tabel ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang kuat antara variabel X₁ dan Y, dengan koefisien Pearson sebesar 0,746 dan tingkat signifikansi 0,000 ($p < 0,01$). Artinya, semakin baik kebijakan kepala daerah, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 5. Statistik Deskriptif Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X₂) dan Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembangunan Ekonomi Pedesaan	54	10	49	31.59	10.806
Kesejahteraan Masyarakat	54	16	50	37.91	9.485

Sumber: Hasil olah data

Rata-rata nilai variabel pembangunan ekonomi pedesaan adalah 31,59 dengan standar deviasi 10,806. Sedangkan nilai rata-rata kesejahteraan masyarakat tetap 37,91 dengan standar deviasi 9,485. Ini menunjukkan bahwa kontribusi persepsi responden terhadap pembangunan ekonomi desa cukup tinggi.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Parsial antara Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X_2) dan Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Variabel 1	Variabel 2	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)
Pembangunan Ekonomi Pedesaan	Kesejahteraan Masyarakat	0.831	0.0
Kesejahteraan Masyarakat	Pembangunan Ekonomi Pedesaan	0.831	0.0

Sumber: Hasil olah data

Terdapat korelasi yang sangat kuat antara X_2 dan Y dengan koefisien Pearson sebesar 0,831 dan signifikansi 0,000 ($p < 0,01$). Ini berarti bahwa peningkatan pembangunan ekonomi pedesaan sangat berhubungan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Berganda (Model Summary)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of Estimate	Durbin-Watson
0.859	0.738	0.728	4.947	2.289

Sumber: Hasil olah data

Nilai R sebesar 0,859 dan R^2 sebesar 0,738 menunjukkan bahwa 73,8% variasi kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan oleh dua variabel bebas, yaitu kebijakan kepala daerah dan pembangunan ekonomi pedesaan secara simultan. Ini menandakan pengaruh yang kuat dan signifikan.

Tabel 8. Hasil Uji t (Parsial)

Variabel	Nilai Koefisien	Standard Error	t Hitung	t Tabel
Kebijakan Kepala Daerah (X_1)	0.292	0.095	3.064	1.68
Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X_2)	0.533	0.09	5.949	1.68

Sumber: Hasil olah data

Variabel kebijakan kepala daerah (X_1) memiliki nilai t hitung sebesar $3,064 > t$ tabel 1,680, dan pembangunan ekonomi pedesaan (X_2) sebesar $5,949 > 1,680$. Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial, kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil uji t mengonfirmasi bahwa kebijakan kepala daerah dan pembangunan ekonomi pedesaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Variabel X_1 memiliki nilai t hitung sebesar $3,064 > t$ tabel 1,680, dan X_2 memiliki nilai t hitung sebesar $5,949 > t$ tabel. Ini menunjukkan bahwa peningkatan salah satu dari kedua variabel akan secara nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil ini mendukung temuan Suwarno dan Andini (2023) yang menyatakan bahwa

kebijakan pemerintahan desa dan pembangunan berbasis potensi lokal menjadi faktor penentu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 9. Hasil Uji F (Simultan)

Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
3520.577	2.0	1760.288	71.937	0.0
1247.961	51.0	24.47	nan	nan
4768.537	53.0	nan	nan	nan

Sumber: Hasil olah data

Nilai F hitung sebesar 71,937 jauh > F tabel sebesar 3,178, dengan sig. 0,000. Ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 71,937 dengan signifikansi 0,000 ($p < 0,05$), lebih besar dari F tabel sebesar 3,178. Ini berarti bahwa kebijakan kepala daerah dan pembangunan ekonomi pedesaan secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya integrasi dan koordinasi kebijakan lintas sektor sebagai pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil analisis regresi parsial menunjukkan bahwa kebijakan kepala daerah memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan koefisien korelasi sebesar 0,746 dan signifikansi 0,000 ($p < 0,01$). Temuan ini sejalan dengan penelitian Roni dan Dumadi (2022) yang juga menemukan bahwa kebijakan kepala daerah memiliki kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Dukungan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa, seperti penguatan pelayanan publik dan keterlibatan warga dalam perencanaan pembangunan, terbukti meningkatkan taraf hidup warga desa.

Hasil analisis regresi parsial menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi pedesaan juga memiliki pengaruh positif yang sangat kuat terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan koefisien sebesar 0,831 dan signifikansi 0,000 ($p < 0,01$). Ini berarti semakin baik pembangunan ekonomi yang terjadi di desa, semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat yang dirasakan. Hasil ini diperkuat oleh kajian Rustinsyah (2023) yang menyatakan bahwa penguatan ekonomi lokal, seperti peningkatan UMKM desa dan infrastruktur ekonomi, berkontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa kedua variabel independen yaitu kebijakan kepala daerah dan pembangunan ekonomi pedesaan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sebagaimana ditunjukkan dengan nilai R sebesar 0,859 dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,738. Artinya, 73,8% variasi dalam kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Hal ini menguatkan temuan Hartono dan Putra (2025) yang menegaskan bahwa sinergi antara desentralisasi kebijakan publik dan pengembangan ekonomi desa sangat efektif dalam mengatasi ketimpangan kesejahteraan di daerah.

Hasil penelitian ini secara keseluruhan mendukung hipotesis bahwa baik secara parsial maupun simultan, kebijakan daerah dan pembangunan ekonomi pedesaan memberikan kontribusi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya di Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kepala daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi parsial sebesar 0,746, yang berada pada kategori kuat. Artinya, semakin efektif kebijakan yang diterapkan oleh kepala daerah, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat desa, khususnya perangkat desa di Kecamatan Pabedilan. Pembangunan ekonomi pedesaan juga menunjukkan pengaruh positif yang sangat kuat terhadap variabel kesejahteraan masyarakat, dengan nilai koefisien korelasi parsial sebesar 0,831. Hasil ini mengindikasikan bahwa penguatan aspek ekonomi lokal melalui peningkatan pendapatan, pemerataan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja di desa berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara simultan, kedua variabel independen yaitu kebijakan kepala daerah dan pembangunan ekonomi pedesaan memberikan kontribusi yang besar terhadap variabel dependen kesejahteraan masyarakat, sebagaimana ditunjukkan dalam model regresi berganda dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,738 atau 73,8%. Artinya, 73,8% perubahan atau variasi dalam tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan oleh kebijakan kepala daerah dan pembangunan ekonomi pedesaan secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara kebijakan pemerintahan lokal dan pengembangan ekonomi pedesaan merupakan faktor

strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kebijakan kepala daerah dan pembangunan ekonomi pedesaan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, maka penulis memberikan beberapa saran berikut yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan dan pengelola pemerintahan daerah:

- a. Disarankan agar kebijakan-kebijakan yang sudah terbukti efektif tetap dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Fokus utama perlu diberikan pada kebijakan yang mendukung penyelesaian masalah sosial, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan penciptaan peluang ekonomi yang inklusif.
- b. Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi lokal harus diprioritaskan. Hal ini mencakup pengembangan potensi unggulan desa, dukungan terhadap UMKM, peningkatan akses infrastruktur ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Program pembangunan ekonomi hendaknya bersifat partisipatif dan adaptif terhadap kebutuhan lokal masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Arina, A. I. S., Masinambow, V., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3).
- Batumenyan. (2023). *Model Kemitraan Publik-Swasta dalam Pengembangan Ekonomi Desa*. <https://www.batumenyan.desa.id>
- BPDPKS. (2023). *Perkebunan Sawit Merupakan Lokomotif Ekonomi yang Inklusif*. <https://www.bpd.or.id>
- BPS. (2023). *Kabupaten Brebes dalam Angka 2023*. BPS Kabupaten Brebes.
- Darmawan, H., Kalsum, U., Mizani, H., & Hermina, D. (2023). Konsep Penelitian Casual-Comparative (Ex Post Facto Research). *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(6), 1431–1445.
- Dumadi, R. (2022). Kebijakan Kepala Daerah dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).

- Fadhilah, A. (2015). Pengaruh Kesadaran Merek, Asosiasi Merek, Persepsi Kualitas dan Loyalitas Merek terhadap Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Sepeda Motor Yamaha V-Ixion. *Jurnal MIX*, 6(2), 188–205.
- Hartono, R., & Putra, F. A. (2025). Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Implikasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 6380–6384. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/25483>
- Kemenkeu. (2023). *Peran Dana Desa dalam Pengentasan Kemiskinan*. <https://djpdb.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2023). *Permendesa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39.
- Makbul, M. (2021). *Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian*.
- Nursetiawan, I., Yuliani, D., Prabowo, F. H. E., Maharani, R., Seviany, D. K., & Nugraha, F. S. (2024). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Inovasi Produk Turunan Kopi Berbasis Ekonomi Hijau di Desa Sukamaju. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 4(3), 1169–1178.
- Panda. (2023). *Pengembangan Kewirausahaan Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. <https://www.panda.id>
- Puspasari, H., & Puspita, W. (2022). Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Tingkat Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa terhadap Pemilihan Suplemen Kesehatan dalam Menghadapi Covid-19. *Jurnal Kesehatan*, 13(1), 65–71.
- Rachmad, A. F., Azaria, E., Xusan, Q. N., & Azzahra, N. (2023). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(2), 75–88.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Roni, S., & Dumadi, R. (2022). Pengaruh Kebijakan Kepala Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Bulakamba. *Journal UPY*. <https://journal.upy.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/1052>
- Rustinsyah. (2023). *Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/369542946_Pembangunan_Ekonomi_Pedesaan
- Saprianto, R., Simbolon, T. R., & Hukom, A. (2023). Implikasi Otonomi Daerah pada Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Pariwisata*, 3(2), 68–84.

Sofyan, A. (2023). *Model Pembangunan Ekonomi Desa Berbasis Kemitraan*. Babelprov.go.id.
<https://babelprov.go.id>

Suwarno, A., & Andini, N. (2023). Dampak Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Wawasan Pembangunan*, 7(1).
<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/5310>

Syahza, A., & Suarman. (2013). Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 14(1), 126–139.

Tumiwa, M. I. (2021). Kajian Pembangunan Prasarana Desa Berwawasan Lingkungan.